

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Selat Malaka yang terletak di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Keberadaan Selat Malaka dianggap sama pentingnya seperti Terusan Panama. Perompakan dan pembajakan yang terjadi di Selat Malaka beberapa tahun terakhir ini memberikan dampak yang sangat besar, bukan hanya terhadap Negara-negara yang terletak di sekitar kawasan Selat Malaka tetapi juga Negara-negara lainnya di seluruh dunia terutama yang berada di kawasan Asia Pasifik mengingat setengah dari minyak yang diangkut melintasi daerah ini.

Kekacauan yang terjadi di Selat Malaka tidak bisa dipandang sebelah mata karena apabila hal itu dibiarkan maka akan berakibat fatal terhadap industry Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang dan China karena pasokan minyak ke Negara tersebut akan terhambat dan otomatis akan berdampak juga terhadap Negara-negara berkembang.

Dalam proses pengamanan Selat Malaka, yang bertanggung jawab bukan hanya Negara yang berdaulat di kawasan tersebut saja tetapi Negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat juga ikut berperan aktif. Tetapi keikutsertaan Negara-negara tersebut terutama keterlibatan Amerika Serikat tidak begitu saja dapat

diterima oleh Indonesia yang termasuk Negara berdaulat di kawasan Selat Malaka. Indonesia menganggap keterlibatan Amerika Serikat berkaitan erat dengan politik internasionalnya yang akan dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang keterlibatan Amerika Serikat di Selat Malaka dan bagaimana reaksi Indonesia lebih jauh dalam menanggapi hal tersebut. Sehingga penulis menetapkan skripsi ini dengan judul “sensitifitas Indonesia terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam Mengatasi Kejahatan di Selat Malaka”.

## **B. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dengan adanya skripsi ini yaitu penulis ingin mengetahui seberapa jauh keterlibatan dan peran Amerika Serikat dalam mengatasi kejahatan di Selat Malaka serta kebijakan apa saja yang dilancarkan oleh Amerika Serikat sebagai tindakan dari politik luar negeri dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu penulis juga ingin meneliti maksud Amerika dibalik keikutsertaannya dalam mengamankan Selat Malaka.

Selain tujuan di atas, penulis juga ingin mengetahui alasan-alasan penolakan Indonesia terhadap keterlibatan Amerika Serikat di Selat Malaka dan bagaimana politik luar negeri yang di jalankan oleh Indonesia dalam menghadapi hal tersebut serta kebijakan-kebijakan apa saja yang di ambil oleh Indonesia.

### **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Selat Malaka adalah sebuah Selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Malaysia) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Selain menghubungkan tiga Negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia tersebut, Selat Malaka juga menjadi urat nadi perdagangan yang menghubungkan Asia Barat dan Asia Timur. Panjang Selat Malaka diperkirakan 800 kilometer dengan waktu tempuh 12 jam atau terpendek bila dibandingkan dengan Selat Sunda seluas 1.630 kilometer dengan waktu tempuh 24 jam dan Selat Lombok yang jaraknya 2.780 kilometer dengan waktu tempuh 70 jam.<sup>1</sup>

Sejak 1500 tahun lalu, Selat Malaka selalu digunakan sebagai jalur perdagangan yang dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Beberapa kerajaan di Nusantara, seperti Aceh, Malaka-Riau-Lingga, Banten, dan Makassar, pernah mengukir kejayaan. Kerajaan-kerajaan tersebut menjadi pusat perdagangan dan perniagaan di kawasan Selat Malaka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *www.kapanlagi.com*

<sup>2</sup> *www.kapanlagi.com*

Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi Selat ini, pada 2003, jumlah itu diperkirakan mencapai 11 juta barel minyak per hari, suatu jumlah yang dipastikan akan meningkat mengingat besarnya permintaan dari berbagai negara. Dapat dipastikan bahwa lebih dari 85 persen perdagangan dunia melalui perairan Indonesia terutama di Selat Malaka yang mencapai angka 72 persen dan Selat Sunda yang mencapai 12 persen. Dikarenakan lebar Selat Malaka hanya 1,5 mil laut pada titik tersempit, yaitu Selat Phillips dekat Singapura, itu merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia.<sup>3</sup>

Selat Malaka selama ini tidak saja dikenal sebagai Sea Lines of Trade (SLOT) dan Sea Lines of Communication (SLOC), tetapi juga dipandang sebagai jalur strategis proyeksi Armada Laut negara-negara maritim besar dalam rangka forward presence dan global engagement ke seluruh dunia. Maka apabila keamanan di Selat Malaka terancam maka itu juga menjadi ancaman bagi seluruh Negara dan menimbulkan dampak negative yang akan dirasakan secara global terutama dalam bidang instabilitas perekonomian dunia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Selat Malaka menjadi begitu penting bagi Negara-negara maju, salah satunya yaitu China. Jika Selat Malaka tidak aman dari segala macam kejahatan maka itu akan berdampak buruk bagi perekonomian China

---

<sup>3</sup> [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

karena tanker-tanker China selalu melintasi Selat Malaka dalam membawa minyak dari Timur Tengah. Bukan hanya China saja yang akan merasakan hal itu tetapi juga Negara maju lainnya yaitu Jepang dan Amerika Serikat.

Semua faktor tersebut menyebabkan kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan dan kemungkinan target terorisme. Menurut data yang diterima dan disebarkan oleh International Maritime Bureau's (IMB) yang bermarkas di Kuala Lumpur, kejahatan yang terjadi di Selat Malaka sebanyak 75 kasus perompakan (Piracy) dan perampokan bersenjata (armed robbery) pada tahun 2000. Kasus ini mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2001 menjadi 17 kasus dan menurun lagi menjadi 16 kasus tahun 2002. Tetapi pada tahun 2003 kasus serua mengalami peningkatan menjadi 28 kasus.<sup>4</sup>

Dalam catatan IMB yang lain menyebutkan, di Indonesia kasus perompakan dan perampokan bersenjata di laut, pada tahun 2000 terjadi sebanyak 119 kasus, menurun 91 kasus tahun 2001 dan naik lagi 103 kasus tahun pada 2002 dan kemudian naik lagi menjadi 121 kasus pada tahun 2003. Pada tahun 2003, Indonesia berada di urutan pertama, disusul Banglades 58 kasus dan Nigeria 39 kasus.

Angka-angka tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan kejahatan yang terjadi di Selat Singapura di mana pada tahun 2000 terjadi lima kasus, tahun 2001 tujuh kasus, dan tahun 2002 menjadi lima kasus. Begitu juga di Malaysia, terjadi 21 kasus tahun 2000, 19 kasus tahun 2001, dan 14 kasus tahun 2002. Di Filipina

---

<sup>4</sup> [www.scribd.com](http://www.scribd.com)

sembilan kasus terjadi pada tahun 2000, delapan kasus pada tahun 2001, dan 10 kasus pada tahun 2002.

Bahkan, laporan dari berbagai belahan dunia sepanjang tahun 2003 ada 21 pelaut (seafarers) terbunuh, 40 kali penyerangan, dan 88 orang luka-luka. Terdapat 71 anak buah kapal (crew) atau penumpang dinyatakan hilang dan 21 orang diyakini terbunuh.

Angka-angka kejahatan perompakan di laut yang dicatat IMB sungguh fantastis. Negara mana pun di dunia tak menghendaki hal itu terus berlangsung. Namun, tanggung jawab keamanan di Selat Malaka, khususnya, tak mungkin hanya ditimpakan kepada satu negara saja, seperti Indonesia.

Bagaimana pun juga Malaysia dan Singapura juga turut bertanggung jawab. Apalagi pada kenyataannya, Singapura dan Malaysia lebih banyak memanfaatkan jasa Selat Malaka untuk membangun perekonomiannya.

Di kalangan pelaut Indonesia di Singapura, Selat Malaka dikenal rawan perompakan. Perompakan biasanya terjadi terhadap kapal-kapal besar, seperti tanker pembawa minyak. Tempat-tempat yang rawan itu belakangan diketahui di sekitar daerah Aceh dan Belawan.

Sebagai tanggapan dari krisis ini, angkatan laut Indonesia, Malaysia dan Singapura meningkatkan frekuensi patroli di kawasan tersebut pada Juli 2004. Ketika meningkatnya kerjasama dan pengawasan di antara negara-negara pesisir itu, telah terjadi sejumlah kasus pembajakan.

Ketakutan akan munculnya aksi terorisme berasal dari kemungkinan sebuah kapal besar dibajak dan ditenggelamkan pada titik terdangkal di Selat Malaka (kedalamannya hanya 25 m pada suatu titik) sehingga dengan efisien menghalang lajur pelayaran. Apabila aksi ini berhasil dilancarkan dengan sukses, efek yang parah akan timbul pada dunia perdagangan. Pendapat antara spesialis keamanan berbedabeda mengenai kemungkinan terjadinya serangan terorisme di kawasan ini.

Sebagai Negara pantai yang berdaulat dan terletak di Selat Malaka maka Indonesia, Singapura dan Malaysia memiliki kewajiban untuk mengatasi pembajakan yang terjadi di kawasan tersebut. Bagi Indonesia sendiri, Selat Malaka menjadi penting dan strategis Karena perairan ini berada dalam kawasan dan lintasan kelautan wilayah Indonesia. Hal ini berarti Indonesia memiliki kepentingan untuk mengamankan Selat Malaka dari berbagai ancaman, ini ditinjau dari pertahanan kedaulatan Negara dan perekonomian. Menanggapi hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, baik internal dalam bentuk menggelar operasi keamanan laut sehari-hari maupun eksternal melalui kerja sama dengan Negara-negara tetangga, seperti patroli terkoordinasi Malindo antara Malaysia dan Indonesia serta Indosin antara Indonesia dan Singapura yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun.

Selain Indonesia, Malaysia dan Singapura, kekuatan-kekuatan asing juga turut membantu dalam menciptakan keamanan di Selat Malaka. Salah satu Negara yang terlibat dan mengambil bagian dalam pencapaian keamanan ini adalah Amerika Serikat. Sebagai Negara yang memiliki kepentingan di Selat Malaka, maka Negara

tersebut merasa bahwa ancaman keamanan di Selat Malaka merupakan suatu hal yang sangat serius, karena Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan terpadat di dunia. Sehingga jika hal tersebut terjadi maka suplai Minyak dari Timur Tengah yang melewati Selat Malaka tidak akan pernah sampai ke Negeranya. Hal itu merupakan ancaman terbesar bagi Negara maju seperti Amerika.

Sebagai salah satu Negara yang memainkan peranan penting, keikutsertaan Amerika Serikat dalam mengamankan selat Malaka bukan suatu hal yang disambut gembira oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh politik global Amerika Serikat, terutama dalam beberapa tahun terakhir mereka berusaha untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara dengan meningkatkan kehadiran jumlah pasukan militernya. Keikutsertaan pasukan militer Amerika Serikat untuk memerangi perompakan dan terorisme di Selat Malaka dikhawatirkan hanya menjadi alasan Amerika Serikat untuk melancarkan aksinya menguasai Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Terlepas dari itu semua, keberadaan militer Amerika Serikat sedikit banyak memberikan keuntungan tersendiri bagi selat Malaka. Dengan fasilitas militer yang lengkap dan canggih, Amerika Serikat dapat meningkatkan keamanan di selat Malaka. Penanaman delapan unit radar yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat merupakan bentuk bantuan teknis dalam rangka pengamanan selat tersibuk di dunia tersebut. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa ketiga Negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura tetap menjadikan dan meminta keterlibatan Amerika Serikat



di selat Malaka hanya sebagai kekuatan pendukung saja bukan sebagai kekuatan inti. Amerika Serikat hanya perlu memberikan bantuan teknis saja tanpa melibatkan atau menurunkan kekuatan militer mereka secara berlebihan.

Dari pespektif lain dapat dilihat bahwa keinginan Amerika untuk mengontrol dan menguasai kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari persaingannya dengan China. Amerika Serikat mengambil kebijakan dengan menempatkan militernya untuk mengontrol dan menguasai selat Malaka karena Amerika Serikat menyadari bahwa selat Malaka merupakan urat nadi China. Dengan mengambil kebijakan tersebut, maka Amerika Serikat menganggap hal itu merupakan langkah yang strategis untuk menjinakkan China di kawasan Asia Tenggara serta langkah awal bagi Amerika menuju gerbang kendali Asia Tenggara.

Hal ini menyebabkan terjadinya penolakan yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia menyadari bahwa selat Malaka akan dijadikan ajang pertempuran Negara-negara adidaya dalam rangka menguasai Asia Tenggara. Indonesia merasa bahwa keamanan selat Malaka tetap menjadi kedaulatan tiga Negara yang berada di kawasan tersebut yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sehingga keterlibatan pihak asing di kawasan Selat Malaka hanya dianggap sebagai pengguna dan pendukung saja. Kalaupun ada Negara yang ingin membantu dalam mengamankan Selat Malaka hal itu cukup ditunjukkan dengan memberikan bantuan teknis seperti penyediaan kapal patroli, tidak perlu mengerahkan pasukan militernya. Bagi Indonesia, keamanan Selat Malaka tetap menjadi prioritas tiga Negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Penolakan terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam rangka pengamanan selat Malaka dilakukan dengan tegas oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) menyatakan sikapnya untuk tidak menerima keberadaan militer asing dalam pengamanan di Selat Malaka<sup>5</sup>. Amerika Serikat pernah mencoba membicarakan prospek pengiriman kekuatan militer untuk menjaga Selat Malaka. Namun, Amerika Serikat segera mengubur gagasan itu setelah mendapat tentangan dan penolakan keras dari Indonesia dan Malaysia.

Selain gagasan yang tidak akan pernah disetujui tersebut, usaha lain juga dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menawarkan Indonesia untuk bergabung dalam Inisiatif Keamanan Proliferasi (Proliferation Security Initiative/PSI). Tawaran tersebut juga ditolak oleh Indonesia karena apabila Indonesia menandatangani kerjasama ini sama artinya dengan mengizinkan Amerika Serikat dan Negara sekutu untuk memeriksa kapal laut manapun di lautan lepas termasuk selat Malaka, hal tersebut menyebabkan keberadaan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat di selat Malaka dikesampingkan padahal Amerika Serikat menyadari bahwa semua yang terjadi di selat Malaka merupakan tanggung jawab Indonesia. Sehingga tawaran tersebut juga ditolak oleh Indonesia.

---

<sup>5</sup> [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

#### **D. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

***“Mengapa muncul sensitifitas/penolakan Indonesia terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam mengatasi kejahatan di selat Malaka ?”***

#### **E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori-teori atau pendapat para ahli yang berkorelasi dengan obyek yang dikaji oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian sehingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis.

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat digunakan. Suatu teori di butuhkan sebagai pegangan pokok secara umum terdiri dari dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran yang terdiri dari berbagai fakta yang membentuk dalil tertentu.

Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan sulit dipahami, di sisi lain teori juga berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Jack C Plano, *The International relation Dictionary*, Santa Barbara, California Press, 1992, hal 7

Menurut B.N. Marbun, teori yaitu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>

Menurut Mochtar Mas' oed, teori merupakan penjelasan yang paling umum memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian selain di pakai untuk eksplanasi, teori juga merupakan dasar dari sebuah prediksi dari pengertian ini, singkatnya teori dapat juga dikatakan sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi.<sup>8</sup>

Untuk dapat memberikan penjelasan tentang munculnya sensitifitas pemerintah Indonesia terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam mengatasi kejahatan di selat Malaka, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan **teori politik luar negeri**.

Dalam hubungannya dengan Negara lain, sebuah Negara memiliki politik luar negeri yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu Negara terhadap Negara lain. Pada dasarnya politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Jack C. Plano dan Roy Olton menyatakan bahwa :

---

<sup>7</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal 529

<sup>8</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional*, LP3ES, Jakarta, 1993, hal 217

*foreign policy is a strategy or planed course of action developed by the decision makers of state vis a vis other state or international antities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest”.*<sup>9</sup>

*“politik luar negeri adalah sebuah strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh para pembuat keputusan suatu Negara lain atau unit politik Internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional”*

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa politik luar negeri itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu Negara. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional suatu Negara.

Politik luar negeri senantiasa ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional karena kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi suatu Negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang berupa tujuan suatu Negara<sup>10</sup>. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep kepentingan nasional.

Setiap entitas Negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa Negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri

---

<sup>9</sup> Jack C Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Holt, Rineheart & Winston, USA, 1967, hal 127

<sup>10</sup> J. Frankel, *International Relations*, Terjemahan Laila Hasyim, Ans. Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1980

yang dijalankan Negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya<sup>11</sup>. Artinya, politik luar negeri merupakan politik yang dijalankan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki.<sup>12</sup>

Adapun elemen-elemen dari kepentingan nasional yaitu mencakup pertahanan diri (*self preservation*), kemandirian (*independence*), integritas territorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*militar security*), dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).<sup>13</sup>

Berdasarkan elemen-elemen kepentingan nasional diatas dapat dipahami bahwa penolakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam upaya mengatasi kejahatan di selat Malaka di latarbelakangi oleh faktor kemandirian dan integritas territorial. Dengan tidak melibatkan pasukan dan pihak asing, Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dengan menggunakan peralatan yang sederhana jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan keadaan ekonomi yang sangat terbatas, Indonesia mampu memberikan rasa aman di selat Malaka yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu Indonesia juga ingin membuktikan bahwa Indonesia tidak selalu berada di bawah bayang-bayang dan

---

<sup>11</sup> Athiqah Nur Alami, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, hal 26

<sup>12</sup> Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal 10

<sup>13</sup> Jack C plano, *Op. Cit*, hal 217

tekanan Amerika Serikat. Indonesia mampu berdiri sendiri dan bersikap tegas dalam setiap upaya pihak asing yang ingin melibatkan diri di selat Malaka.

Berkaitan dengan integritas territorial, semua pihak mengetahui dan mengakui bahwa selat Malaka merupakan bagian dari Indonesia, Malaysia dan Singapura sehingga hanya Negara-negara tersebut yang berhak untuk menerjunkan kekuatan militernya secara penuh dalam rangka pengamanan kawasan selat Malaka. Setiap Negara berhak untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dengan cara apapun juga seperti yang dilakukan Indonesia terhadap Amerika Serikat, walaupun Indonesia menyadari bahwa kekuatan Amerika tidak akan dapat tersaingi oleh Indonesia. Walaupun ada keterlibatan pihak asing terutama Amerika Serikat di selat Malaka, hal itu tidak terlepas hanya sebagai pendukung saja bukan merupakan kekuatan inti.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional bersumber dari seluruh nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu Negara terhadap Negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap Negara dalam melaksanakan politik luar negerinya, dimana Negara tersebut tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu Negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori politik luar negeri dapat diambil kesimpulan bahwa, penolakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap keterlibatan pihak asing di Selat

---

<sup>14</sup> Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internasional*, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hal 32

Malaka merupakan suatu kebijakan politik luar negeri yang di ambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.

Untuk lebih memahami hal tersebut maka kita perlu mengetahui pengertian kebijakan. Menurut B.N. Marbun, kebijakan yaitu :

“Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran”.<sup>15</sup>

Kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan nasional yang di ambil oleh pemerintah ini bisa diartikan positif dan negatif apabila :

- ❖ Dikatakan positif apabila kebijakan ini mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menangani masalah.
- ❖ Sedangkan dikatakan negative apabila pihak pemerintah tidak melakukan penanganan apapun.

Dari berbagai kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia diharapkan mampu memberi dan memiliki tujuan yang positif, terutama bagi kedaulatan Negara Indonesia, keamanan Selat Malaka serta Negara-negara lain yang memanfaatkan jalur pelayaran dan perdagangan tersebut. Dalam keterlibatan Amerika Serikat yang ikut menangani masalah keamanan di Selat Malaka, pemerintah Indonesia sudah

---

<sup>15</sup> B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2005, hal 263



selayaknya memberikan perhatian yang lebih besar, mengingat keamanan Selat Malaka adalah tanggung jawab Indonesia.

Setiap Negara yang ikut membantu Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam mengatasi kejahatan di Selat Malaka pasti mempunyai kepentingan nasional yang berbeda-beda. Hal itu perlu diantisipasi mengingat Negara-negara yang turun tangan dalam masalah tersebut adalah Negara-negara maju yang sekarang ini sedang melakukan persaingan dalam berbagai bidang. Hal itu di khawatirkan akan memberikan dampak yang buruk karena disadari atau tidak, Selat Malaka akan di jadikan ajang pertempuran Negara-negara maju untuk menguasai Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Keterlibatan pihak asing di Selat Malaka terutama Amerika Serikat hanya dianggap sebagai pengguna saja, jadi keikutsertaan mereka dalam rangka pengamanan hanya perlu dilakukan sekedarnya saja, bukan menjadi yang utama. Keikutsertaan Amerika Serikat dikhawatirkan akan menyebabkan Negara-negara lain mengambil tindakan yang sama sehingga Selat Malaka nantinya akan menjadi suatu kawasan yang di kuasai oleh pihak asing tanpa mempedulikan Negara-negara yang berdaulat di sekitar perairan Selat Malaka tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Indonesia dengan mengadakan patroli bersama dengan Malaysia dan Singapura merupakan suatu keputusan yang benar, mengingat Malaysia dan Singapura juga Negara yang berdaulat di kawasan Selat Malaka. Patroli ini dapat membuktikan bahwa keamanan di Selat Malaka menjadi perhatian serius

dari ketiga Negara, sehingga pihak asing yang ingin melibatkan militernya di Selat Malaka dapat melihat bahwa perkembangannya dan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

## **F. HIPOTESA**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan, maka penulis mempunyai hipotesa sebagai berikut :

1. Penolakan Indonesia terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam mengatasi kejahatan di selat Malaka dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Indonesia yang tidak menginginkan selat Malaka menjadi sebuah kawasan yang ditempati oleh militer asing.
2. Keberadaan militer Amerika Serikat di selat Malaka dikhawatirkan akan memberikan dampak negative terhadap proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

## **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Sebagai sebuah usaha untuk menghindari diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah sehingga akan mengaburkan isi dan topic pembahasan, maka di perlukan pembatasan. Upaya pembatasan masalah tersebut dimaksudkan agar penulis tetap terfokus pada masalah yang diteliti sehingga akan mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data. Selain itu, penyempitan

masalah yang akan di kaji juga bertujuan untuk membuat penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari apa yang akan dan telah dikaji.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi penelitian pada penolakan Indonesia terhadap keterlibatan Amerika Serikat di Selat Malaka. Dengan adanya pembatasan penelitian maka penulis akan mudah melihat bagaimana politik dan kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya dengan melakukan penolakan terhadap keterlibatan Amerika Serikat di Selat Malaka. Selain itu penulis juga akan melihat sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat di Selat Malaka dan apa usaha yang dilakukan oleh Indonesia dalam menciptakan keamanan di kawasan tersebut.

## **H. METODE PENELITIAN**

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang bersifat literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (library research). Riset kepustakaan ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai macam literature buku, majalah, Koran yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh data-data dari media internet sebagai sarana pendukung utama serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak untuk kaidah penulisan ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia, kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia di ASEAN dan di dunia.

### **BAB III : POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI SELAT MALAKA**

Bab ini berisi pembahasan tentang selat Malaka secara umum dan arti penting selat Malaka. Selain itu juga akan membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat, kebijakan-kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh Amerika Serikat dalam mengatasi kejahatan di Selat

Malaka serta membahas tentang kepentingan Amerika Serikat di balik keterlibatannya di Selat Malaka.

**BAB IV : ALASAN PENOLAKAN INDONESIA TERHADAP KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DI SELAT MALAKA**

Dalam bab ini akan membahas tentang alasan-alasan Indonesia melakukan penolakan terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam mengatasi kejahatan di selat Malaka.

**BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta berisi saran-saran sebagai perbaikan di kemudian hari.